



**IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA
STUDI KASUS NAGARI SIAGA BENCANA (NAGASINA)
DI NAGARI GANGGO HILIA KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN**

Aldio Surya Dirga^{1,2}, Taslim Djafar¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²corresponding author: aldio.suryadirga@ipdn.ac.id

ABSTRACT

In order to optimize disaster management Regional Disaster Management Agency (BPBD) forming a group in village called Kelompok Nagari Siaga Bencana (Nagasina). The researcher want to know the implementation of Nagasina as an effort of disaster management in Ganggo Hilia Village Bonjol District, obstacles faced in implementation and the way of Kelompok Nagari Siaga Bencana in Ganggo Hilia Village Bonjol District Pasaman Regency to optimize the action appropriate the plan. The response process are focused to pre-disaster phase, that is prevention, mitigation, and preparedness. The implementation of disaster management by Kelompok Nagari Siaga Bencana (Nagasina) in Ganggo Hilia Village Bonjol District Pasaman Regency can be known from some factor, that is communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research use qualitative method and data collecting technique by observation and interviewing informant which have skill or authority so that will makes more easier the researcher to analyze it. The secondary data in the research is coming from documents of Pasaman Regency Government and by online searching. The communication which developed by Nagasina with the stakeholders are good but in the coordination with related Ministry or Institution are not optimal. Nagasina didn't able to utilize the Information and Technology in information management and publish the information to the people. Nagasina Ganggo Hilia Village already have the human resources by the quantity but they need optimization about human resources quality, tools and budgeting. The disposition of Nagasina Ganggo Hilia Village are good, because it consistent with the commitment and has calculated targets. The organizational structure of Nagasina are ideal, because they have calculated procedures operational standard and carried out with the commitment as well as having simple bureaucracy of action permit.

Keywords: *Implementation; Disaster Preparedness Village; Disaster Management*



ABSTRAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk Kelompok Nagari Siaga Bencana (Nagasita) agar pelaksanaan penanggulangan bencana lebih optimal. Penulis ingin melihat pelaksanaan Nagasina sebagai upaya penanggulangan bencana di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya Kelompok Nagari Siaga Bencana di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal sesuai rencana. Proses penanggulangan terfokus kepada tahapan pra bencana, yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Implementasi penanggulangan bencana oleh Kelompok Nagari Siaga Bencana (Nagasina) di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dapat dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan tehnik pengambilan data adalah observasi dan mewawancarai informan yang memiliki keahlian atau memiliki kewenangan sehingga akan memudahkan penulis dalam menganalisis. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dokumen-dokumen kepustakaan Pemerintah Kabupaten Pasaman dan penelusuran data online. Komunikasi yang dibangun Nagasina dengan pihak terkait sudah baik tetapi belum optimal dalam berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Nagasina belum mampu memanfaatkan IT dalam pengelolaan informasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nagasina Ganggo Hilia sudah memiliki kuantitas sumber daya manusia tetapi masih membutuhkan optimalisasi pada kualitas sumber daya manusia, sumberdaya sarana dan sumber daya anggaran. Disposisi Nagasina Ganggo Hilia sudah terlaksana dengan baik karena disposisi dilaksanakan sesuai komitmen dan memiliki target yang terukur. Struktur organisasi Nagasina sudah ideal karena memiliki SOP yang terukur dan dilaksanakan dengan komitmen serta memiliki alur perizinan kegiatan yang singkat.

Kata Kunci: Implementasi; Nagari Siaga Bencana; Penanggulangan

PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Heryati, 2020). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sampai tanggal 18 Januari 2023 terjadi 3.542 kali bencana alam di Indonesia sepanjang 2022. Adapun kejadian bencana alam yang mendominasi adalah cuaca ekstrem sebanyak 1.530 kali, banjir sebanyak 1.067 kali, dan tanah longsor sebanyak 634 kali. dampak dari bencana alam tahun 2022 adalah 857 korban bencana yang meninggal dunia, 46 hilang, dan 8.726 luka-luka.

Kabupaten Pasaman adalah salah satu daerah yang memiliki potensi rawan bencana alam cukup tinggi. berdasarkan data Kebencanaan BNPB Kabupaten Pasaman tahun 2022, selama tahun 2022 telah terjadi 70 kali angin puting beliung, 14 kali banjir, 9 kali kebakaran hutan, 5 kali gempa bumi dan 3 kali bencana longsor. Bencana banjir dan longsor terjadi karena faktor alam dan faktor non alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Alim Bazar, S. Sos sebagai pejabat Kepala BPBD Kabupaten Pasaman. Beliau menyampaikan bahwa bencana banjir dan longsor disebabkan oleh faktor alam curah hujan cukup tinggi dan cuaca ekstrim. Faktor lain yang menjadi penyebab bencana longsor di Kabupaten Pasaman adalah Kabupaten Pasaman memiliki banyak aliran sungai seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan dan das kampar. Ketika terjadi curah hujan ekstrim, aliran sungai tersebut akan bertemu dan membentuk aliran besar yang berpotensi menjadi banjir dan tanah longsor. Umumnya kawasan hulu DAS menjadi resapan air dan pengendali tata air yang penggunaan lahannya berupa

hutan lindung, berubah menjadi lahan pertanian, perkebunan, pertambangan dan pemukiman. Peningkatan aliran permukaan, erosi tanah, menurunnya kesuburan tanah berdampak pada terjadinya lahan kritis di kawasan hutan lindung. Pembukaan lahan hutan lindung menyebabkan hanyutnya sedimen. Sedimen yang hanyut tersebut menyebabkan terjadinya pendangkalan sedimen yang rawan banjir ketika terjadi hujan dengan intensitas besar.

Aktivitas masyarakat memberi dampak pada kondisi lingkungan yang menjadi satu faktor penting sebagai pemicu terjadinya longsor ketika terjadi curah hujan yang tinggi. Longsor yang terjadi di Kabupaten Majalengka dipicu oleh curah hujan dan perkembangan aktivitas manusia (Tejakusuma, 2018). Faktor aktivitas manusia misalnya pembangunan jalan dan perumahan serta pembukaan lahan untuk dijadikan objek pariwisata atau hutan yang dikelola dan digunakan masyarakat untuk pertanian atau perkebunan memiliki kontribusi dalam terjadinya longsor. Pengetahuan dalam pembukaan lahan di kawasan hutan merupakan sangat penting untuk diketahui oleh pengelola lahan karena kesalahan tindakan dalam membuka lahan dapat merusak hutan dan mengancam keselamatan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi mengurangi resiko bencana alam yang terjadi dari berbagai aspek dan mencegah bencana alam sebagai upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam (Rusmawan et al., 2023). Partisipasi Masyarakat dalam bentuk partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda keterampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial (Ristiani, 2020). Konversi atau alih fungsi kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan juga terjadi untuk kebutuhan di sektor perkebunan. Pemerintah dan masyarakat harus membenahi faktor non alam untuk meminimalisir dampak bencana dengan

meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka mengantisipasi bencana alam banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan dan hutan agar tidak terjadi. Membakar ilalang dengan cara yang salah atau ceroboh dapat menyebabkan kebakaran hutan. Semakin banyak pohon yang terbakar akan mengurangi penahan tanah ketika hujan. Dampak kebakaran hutan dan kebun para petani yang ada disekitar kebakaran akan meningkatnya suhu udara dan terjadinya longsor (Fahmi, 2022). Pergeseran guna lahan akan mengurangi kawasan hijau untuk daerah resapan air yang menjadi faktor penyebab bencana alam (Mubarokah & Hendrakusumah, 2022). Ada juga faktor sosial seperti pemahaman masyarakat mengenai pembangunan yang berorientasi lingkungan dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Nagari Ganggo Hilia memiliki objek wisata Air dan Bukit yaitu wisata air Arum jeram dan Bukit Benteng Bukit Tajadi adalah Benteng Pertahanan Tuanku Imam Bonjol dan berbagai macam tanaman hias seperti Kaktus. Pengembangan objek wisata biasanya diikuti dengan pembuatan lapak dan stand berjualan oleh warga sekitar agar berdampak pada kenaikan sektor perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat Nagari Ganggo Hilia perlu dibekali pengetahuan meminimalisir dampak bencana saat pembukaan lahan terbuka hijau dalam upaya pencegahan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan leading sector yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari bencana. BPBD merupakan lembaga pemerintah daerah yang menjalankan fungsi koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana (Heryati, 2020). Bentuk upaya BPBD dalam penanggulangan bencana adalah melengkapi ketersediaan fasilitas

petunjuk data, informasi dan literasi kebencanaan yang terintegrasi yang berkualitas. Berdasarkan Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pasaman Tahun 2022, realisasi pelayanan informasi rawan bencana hanya terdapat 1 dokumen yaitu penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Redi Saputra sebagai Kepala Jorong dan Ketua Bidang Humas dan Publikasi Nagari Siaga Bencana (Nagasina) Nagari Ganggo Hilia, bahwa belum tersedia fasilitas petunjuk kebencanaan di Nagari.

Penanggulangan bencana membutuhkan kompetensi pegawai sebagai penyelenggara kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Pasaman, beliau menyampaikan bahwa kapasitas sumber daya manusia masih rendahnya, misalnya cepat, tepat dan efektif pada tahapan penanganan darurat. Keterbatasan kapasitas pegawai BPBD dan terkendala jarak Kantor BPBD Ke Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman sejauh 19 km yang sepanjang jalan sebagian besar kelokan, tidak terlalu besar dan disekitar jurang membuat pengawasan bencana alam di Nagari Ganggo Hilia tidak dapat terlaksana dengan cepat apabila terjadi bencana pada waktu yang tiba-tiba. BPBD membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat. BPBD harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut membantu dalam kegiatan penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan bencana dan mengurangi resiko bencana. Manajemen bencana yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan multi pihak dan partisipasi komunitas secara simultan (Ulum, 2013). Optimalisasi upaya penanggulangan bencana dengan melibatkan partisipasi masyarakat dapat

menjadi alternatif pilihan oleh BPBD. Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa BPBD harus membentuk masyarakat yang siaga serta aktor yang mandiri dan mampu menjaga diri dan keluarganya dari bencana dalam upaya meminimalisir dampak bencana dan korban jiwa di Nagari Ganggo Hilia. Keterlibatan masyarakat bisa dilaksanakan dengan menguatkan kelembagaan kelompok masyarakat sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terkoordinir dan terarah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alim Bazar, diketahui bahwa BPBD sudah membentuk 14 Kelompok Nagasina se Kabupaten Pasaman dan 4 Kelompok di Kecamatan Bonjol. BPBD berperan sebagai koordinator, pengarah, pembina dan pengawas agar penyelenggaraan Nagari Siaga ini dapat mencapai target sesuai tujuan. BPBD melaksanakan penyuluhan kepada Kelompok Nagasina, masyarakat dan siswa sekolah. Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa BPBD harus membentuk masyarakat yang siaga serta aktor yang mampu menjaga dirinya dan keluarganya sendiri dari bencana dalam upaya meminimalisir dampak bencana dan korban jiwa di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Dalam memenuhi harapan tersebut Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman perlu menyiapkan masyarakat Nagari yang tangguh dalam menghadapi bencana alam. BPBD Kabupaten Pasaman bekerja sama dengan Camat dan Wali Nagari membentuk Kelompok Nagari Siaga Bencana (Nagasina). Desa siaga bencana diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat atau komunitas dalam menghadapi bencana, khususnya pada saat terjadi bencana (Wardhono et al., 2020).

Wali Nagari Ganggo Hilia mengeluarkan Keputusan Wali Nagari Ganggo Hilia Nomor: 23/Kpts/WN-GH/2022 tentang Pembentukan Nagari

Siaga Bencana Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Tujuan dibentuknya Nagasina adalah agar masyarakat Nagari yang komunitas Nagasina dapat menangani bencana tepat waktu, terkoordinir dan terpadu di Nagari Ganggo Hilia serta mengelola informasi siaga bencana berbasis information technology (IT). Penulis ingin melihat pelaksanaan Nagasina sebagai upaya penanggulangan bencana di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya Kelompok Nagari Siaga Bencana di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal sesuai rencana. Atas dasar hal tersebut, melatarbelakangi penulis untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “implementasi penanggulangan bencana Studi Kasus Nagari Siaga Bencana (Nagasina) di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”.

KAJIAN TEORI

1) Implementasi

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) mengemukakan bahwa “Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”. Organisasi perangkat daerah sebagai implementer bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan agar masyarakat sebagai kelompok sasaran dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Pada penelitian ini penulis ingin melihat pelaksanaan Keputusan Wali Nagari Ganggo Hilia Nomor: 23/Kpts/WN-GH/2022 tentang Pembentukan Nagari Siaga Bencana Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

Nagasina dapat menggunakan dana Nagari untuk melengkapi fasilitas sarana prasarana dan memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam penanggulangan bencana di Nagari Ganggo Hilia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 5 ayat (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa huruf (c) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. Pada bagian lampiran Peraturan Menteri tersebut diuraikan bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana desa dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana alam adalah sebagai berikut.:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. alat pemadam api ringan di Desa;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi (Subekti et al., 2017) yang berperan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan sukses, yaitu:

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor mendasar yang harus dimiliki oleh aktor yang bertugas menyelenggarakan sebuah kebijakan. Komunikasi yang dilaksanakan dapat berupa laporan, koordinasi, kolaborasi maupun sinergi. Target dan tujuan kebijakan dapat tercapai apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik. Penyelenggara kebijakan dapat memanfaatkan sarana informasi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Terdapat media sosial, media cetak maupun elektronik agar informasi dapat tersampaikan dengan optimal. Contohnya adalah penggunaan media.

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat intensitas komunikasi yang terlaksana dalam kegiatan Nagasina, karena ketika komunikasi dilaksanakan dengan intens akan memudahkan pelaksanaan kegiatan dan menghindari kesalahan langkah pelaksanaan. Indikator lain dalam intensitas komunikasi adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Penulis juga ingin melihat efektivitas komunikasi yang terlaksana memberi dampak kepada pelaksanaan Nagasina. Dampak yang diterima dalam komunikasi yang dilaksanakan termasuk pemahaman terhadap informasi dan perubahan setelah diberikan informasi tersebut.

2. Faktor Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kebijakan. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, dan sumber daya keuangan. Indikator sumber daya manusia terdiri dari kualitas dan kuantitas aparatur. Sumber daya manusia harus diberikan kompetensi dan pengetahuan agar dapat melaksanakan kegiatan dengan cepat dan tepat. Penyelenggara dituntut untuk mampu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat menyelamatkan diri dan keluarganya ketika terjadi bencana.

Keterbatasan sumber daya mengharuskan BPBD melibatkan kelompok masyarakat untuk membantu penanggulangan bencana. Sumber daya sarana dan prasarana untuk mendukung agar kegiatan penanggulangan bencana dapat terlaksana lebih optimal. Sumber daya keuangan dibutuhkan untuk operasional kegiatan misalnya membeli BBM dan menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan.

3. Faktor disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap dan keseriusan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Penyelenggara yang ideal harus melaksanakan tugas sesuai disposisi peraturan yang berlaku dan instruksi pemerintah.

4. Faktor struktur birokrasi

Struktur organisasi berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan karena ketika pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

akan cenderung lama karena membutuhkan banyak perizinan yang dilalui. Sebaiknya perizinan dilaksanakan dengan singkat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. BPBD harus memiliki mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, terukur dan mudah dimengerti sehingga mudah dimengerti oleh pelaksana. SOP yang mudah dimengerti akan memudahkan pelaksana dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Indikator pada implementasi kebijakan menurut penulis adalah:

Tabel 1. Indikator Penelitian

No.	Faktor	Indikator	Sub indikator
1.	Komunikasi	Intensitas Komunikasi	Intensitas
		Efektivitas Komunikasi	Kemudahan dalam berkomunikasi Dampak bagi Anggota Pemahaman Perubahan setelah komunikasi
2.	Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Kualitas Anggota Kuantitas Anggota
		Sumber Daya Sarana	Fasilitas Kelompok
		Sumber Daya Anggaran	Anggaran Kelompok
3.	Disposisi	Komitmen	Melaksanakan sesuai kesepakatan
		Terukur	Memiliki target yang dapat diukur
4.	Struktur Organisasi	Standard Operasional	Terukur
		Prosedur	Komitmen
		Struktur Organisasi	Alur perizinan

Sumber: Faktor George C. Edward III yang diolah oleh Penulis

2) Manajemen Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap, yaitu: 1) pra bencana, 2) saat tanggap darurat, 3) dan pasca bencana. Tahapan pra bencana sangat penting agar keseluruhan proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik (Machruf et al., 2020).

Penanggulangan bencana memiliki cakupan yang luas, penulis mempersempit pembahasan tentang penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada tahapan pra bencana. Hal ini penulis lakukan agar penulisan dapat fokus pada kegiatan kelompok Nagari dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Pada dasarnya

penyelenggaraan pra bencana dilaksanakan dengan kegiatan seperti berikut:

1. Pencegahan

Upaya pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya bencana. Contohnya adalah mengelola kembali hutan dengan menanam tanaman yang mampu menahan tanah dan menyerap air untuk mencegah banjir dan longsor.

2. Mitigasi

Mitigasi adalah upaya yang dilaksanakan sebagai upaya mengurangi risiko dampak bencana berupa pembangunan fisik maupun edukasi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contoh kegiatan mitigasi adalah membangun irigasi agar banjir tidak menggenangi jalan dan lahan sawah masyarakat.

3. Kesiapsiagaan

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan membuat strategi yang tepat untuk menghindari terjadinya bencana dan waspada. Contoh kegiatan kesiapsiagaan meliputi penyusunan rencana pencegahan bencana, menyiapkan sarana komunikasi, menyiapkan lokasi evakuasi, pelatihan personil, penyediaan sarana dan prasarana.

Manajemen bencana merupakan sebuah proses yang terus menerus yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk merencanakan dan mengurangi dampak bencana, melaksanakan kegiatan tanggap bencana dan membuat langkah pemulihan kembali (Susanto 2006:10). Gagasan negara mengatur (*regulatory states*) memposisikan negara sebagai aktor yang dominan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kendala yang dihadapi adalah cara negara yang cenderung kurang fleksibel karena

sulitnya medan yang ditempuh. *Regulatory states* tersebut penting dalam stabilisator, tetapi dalam kondisi tertentu menjadi resistor karena mata rantai birokrasi dan prosedur administrasi yang berbelit-belit dalam melakukan aksi penanggulangan bencana. Sehingga penanganan bencana versi negara menjadi tidak efektif dan efisien untuk dilakukan (Wicaksono & Sibuea, 2022).

Kegiatan manajemen penanggulangan bencana dapat dilaksanakan pemerintah dengan proses dialog bertatap muka untuk membangun kepercayaan. Tahapan selanjutnya adalah membuat komitmen bersama terhadap proses dan berbagi pemahaman untuk agar semua pihak memperoleh pengetahuan yang wajib dimiliki dan memperoleh penyamaan persepsi. Kegiatan dialog bersifat penting dengan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidangnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dibutuhkan dialog dan diskusi untuk melakukan pemetaan titik pedesaan yang memiliki angka rawan bencana alam kemudian melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan pihak pemerintah desa serta berbagai pihak dalam penanggulangan bencana alam untuk memperoleh informasi secara akurat. Berdasarkan informasi tersebut dapat dirumuskan berbagai alternatif tanggap bencana yang terjadi dan menanggulangi bencana alam.

Pembentukan kesepakatan dilaksanakan oleh Pemerintah dengan tujuan memperoleh kesepakatan visi dan orientasi tugas agar menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah harus selalu menjalin koordinasi satu dengan yang lain secara rutin dilakukan dari level nagari, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai kesepakatan dalam upaya menjaga kepercayaan. Rangkaian kegiatan

dilaksanakan dengan prioritas tujuan untuk melindungi masyarakat, mampu melakukan mitigasi dan tanggap bencana yang bisa terjadi kapan saja. Selain itu, kepercayaan masyarakat dalam manajemen penanggulangan bencana alam berdampak pada dukungan oleh semua pihak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengendalikan dampak bencana alam. Bentuk kegiatan partisipasi masyarakat yang dapat dilaksanakan adalah dengan memberikan pelatihan kesiapsiagaan dan kewaspadaan penanggulangan bencana kepada masyarakat setempat membuat warga lebih peduli akan wilayahnya. Pembentukan Desa Tangguh menjadikan warga lebih percaya diri dan mandiri (Saptadi & Djamal, 2012).

Komitmen menjadi faktor kunci setiap program dapat terlaksana dengan optimal. Komitmen yang dibangun dalam proses kolaborasi menjadi bekal setiap agenda kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama sesuai rencana bersama. Dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam perlu dibuat rapat awal tentang rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dalam upaya penanggulangan bencana dengan melibatkan masyarakat dan pihak swasta. Kemudian, BPBD membentuk komitmen bersama berbentuk MoU antara pemerintah dengan pihak terlibat untuk membagi tugas sesuai keahlian masing-masing sehingga semua langkah dan tahapan tidak ada yang terlewatkan. kelompok masyarakat yang berperan dalam tanggap bencana awal di Nagari harus diberikan surat tugas atau SK secara legal, sehingga merasa diberikan kepercayaan dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan peran sesuai komitmen yang dibuat.

BPBD dan Kelompok masyarakat harus secara berkala membagikan informasi dan progres kegiatan dalam upaya membangun kepercayaan dengan

cara keterbukaan informasi dan kesamaan visi untuk mencapai alternatif dari masalah yang dihadapi. Melalui keterbukaan informasi tersebut, kita dapat melihat pemahaman masing-masing pihak terhadap tugas dan peran keterlibatannya. Melalui keterbukaan informasi, semua pihak juga dapat melihat tugas dan peran yang belum dilaksanakan dan membantu pihak yang kesulitan. Berdasarkan keterbukaan informasi, semua pihak dapat melihat kelemahan rencana kerja yang dibuat dan menyepakati kembali rencana yang mampu mengatasi kelemahan yang terlihat.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif karena dapat menjelaskan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti dan menggambarkan situasi yang sedang terjadi di lapangan. Penentuan informan yang akan di wawancarai menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2013:218), "*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu". Tehnik pengambilan data yang penulis laksanakan pada penelitian ini adalah observasi dan mewawancarai informan yang memiliki keahlian dan pemahaman tentang harapan penulis atau memiliki kewenangan sehingga akan memudahkan penulis dalam menganalisis. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dokumen-dokumen kepustakaan Pemerintah Kabupaten Pasaman dan penelusuran data online (Baidhowah & Nangameka, 2020). Dalam penelitian yang menjadi informan, meliputi:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman.

Penulis akan bertanya kepada BPBD sebagai penanggungjawab kegiatan penanggulangan bencana terkait

pembinaan dan pengawasan Nagasina agar pelaksanaannya sesuai prosedur dan tujuan Nagasina, bentuk komunikasi dan kolaborasi BNPD dan Nagasina Nagari Ganggo Hilia, serta support yang diberikan BPBD kepada Nagasina, komunikasi yang dilaksanakan dengan pihak terkait, ketersediaan sumber daya dan struktur Organisasi Nagasina.

2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman.

Penulis akan bertanya tentang hal-hal teknis terkait pembentukan dan pelaksanaan Nagasina di Nagari Ganggo Hilia.

3. Camat Kecamatan Bonjol.

Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik di Kecamatan. Penulis akan bertanya kepada Camat terkait koordinasi dengan jajaran forum Komunikasi Kecamatan untuk supporting kolaborasi yang dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Penulis juga ingin melihat peranan camat agar kegiatan Nagasina dapat berjalan dengan optimal dan mengantisipasi dampak bencana agar meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat.

4. Wali Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol.

Penulis akan bertanya terkait peran Wali Nagari mendukung kegiatan Nagasina, komunikasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan sumber daya.

5. Ketua Kelompok Nagari Siaga Bencana (Nagasina) di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

Penulis akan bertanya terkait komunikasi yang dilaksanakan dengan pihak terkait, ketersediaan sumber daya, bentuk disposisi yang diberikan dan struktur Organisasi Nagasina.

6. Anggota Kelompok Nagari Siaga Bencana (Nagasina) di Nagari Ganggo

Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

Penulis akan bertanya terkait komunikasi yang dilaksanakan dengan ketua Nagasina, ketersediaan sumber daya, pelaksanaan disposisi yang diberikan Ketua kepompong dan struktur Organisasi Nagasina.

7. Masyarakat Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol.

Penulis akan mewawancarai masyarakat terkait ketersediaan sumber daya dan manfaat penyuluhan yang dirasakan masyarakat dan dampak yang dirasakan dari dibentuknya Nagasina di Nagari Ganggo Hilia.

Dalam kondisi tertentu, informan dalam penelitian ini dapat ditambah bila informasi dirasa masih kurang tetapi dapat dikurangi bila informasi dirasa sudah mencukupi. Peneliti juga dapat mengganti informan jika dianggap tidak kooperatif dalam wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dokumen-dokumen kepustakaan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi penanggulangan bencana Nagari studi kasus Kelompok Nagari Siaga Bencana (Nagasina) di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada tahapan pra bencana yaitu pencegahan, irigasi dan kesiapsiagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang dilaksanakan oleh Nagasina dengan pihak terkait cenderung mengalami kemudahan karena dibantu oleh media sosial dan grup pesan singkat. Hal ini membuat penyebaran informasi dan kebutuhan Nagasina dapat difasilitasi dengan cepat. Nagasina Nagari Ganggo Hilia membentuk komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, yaitu BPBD Kabupaten Pasaman, Camat Kecamatan Bonjol, Wali Nagari dan masyarakat sekitar. Ketua Nagasina Nagari Ganggo

Hilia selalu berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Pasaman, Camat, Wali Nagari dan ketika terjadi curah hujan yang cukup tinggi yang beresiko terjadi banjir dan longsor. Kelompok Nagasina melakukan komunikasi dengan Wali Nagari sesuai kebutuhan kegiatan. Nagari sebagai fasilitator kegiatan selalu menyampaikan himbauan terkait penyuluhan di media sosial. Nagari selalu berpartisipasi dan berkerjasama dengan Nagasina dalam penanggulangan bencana dan penanganan bencana di Nagari Ganggo Hilia. Nagari berencana untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi dengan Nagasina dalam kegiatan mitigasi penanggulangan bencana.

Komunikasi yang dilaksanakan memberikan dampak kepada anggota Nagasina dan masyarakat sekitar. BPBD menyampaikan edukasi tentang penanggulangan bencana kepada kelompok Nagasina dan masyarakat agar meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bencana alam dan upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampak resiko dari bencana alam tersebut. BPBD juga memberikan edukasi kepada siswa sekolah agar dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana alam. Hal tersebut dibenarkan Camat Bonjol Faridh Muhammad Ali yang penulis wawancarai pada tanggal 2 Oktober 2023. Beliau menyampaikan bahwa BPBD sering melaksanakan edukasi dan sosialisasi kebencanaan di Kecamatan Bonjol dan mengapresiasi kegiatan tersebut agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk menghadapi bencana. Camat juga membuat rangkaian kegiatan untuk mendukung kegiatan tersebut. Langkah pertama yang dibuat oleh Camat adalah membuat grup informasi dan diskusi dengan satgas bencana nagari, babinsa dan babinkamtibmas, kepala jorong untuk menyampaikan informasi kejadian-kejadian yg terjadi di wilayah kecamatan Bonjol. Selanjutnya, Camat memfasilitasi

satgas yg membutuhkan bantuan alat atau tenaga bantuan dengan menghubungi pihak Satpol PP, BPBD dan Basarnas. Kemudian Camat menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan informasi bencana, informasi pengembangan keahlian dan sumber daya manusia, atau pemuktahiran Peraturan Perundang-undangan tentang penanganan bencana alam.

Nagasina berhasil membuat komunikasi yang efektif karena komunikasi tersebut mengandung informasi yang membawa dampak bagi anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Komunikasi tersebut juga memberikan pemahaman kepada anggota tentang upaya yang dapat mengantisipasi bencana dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi dampak bencana. Perubahan yang terlihat setelah adanya komunikasi adalah Nagasina bersama pihak terkait mampu membuat tim yang solid dan mampu memberikan respon cepat dalam upaya penanggulangan bencana. Anggota kelompok sudah memahami pertanda bencana dan tindakan cepat yang perlu dilakukan ketika melihat pertanda tersebut.

BPBD memiliki kendala belum optimalnya koordinasi antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana. berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman pada tanggal 21 September 2023, beliau menyampaikan bahwa apabila hal tersebut sudah terlaksana maka BPBD dan kelompok Nagasina dapat mengantisipasi bencana dengan mengurangi aktivitas pada area berbahaya dan merelokasi masyarakat dari wilayah yang rawan bencana menuju area yang aman. Upaya lain yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengedukasi dan menyadarkan masyarakat untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang

dapat menyebabkan bencana alam, misalnya pengelolaan hutan ataupun membuang sampah. Nagasina Nagari Ganggo Hilia belum mengembangkan penggunaan IT dalam pengelolaan data. Contoh penggunaan IT dalam pengelolaan data adalah di Pemerintah Kabupaten Karawang yang membuat TANGKAR yang menggunakan IT untuk membantu menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang sosial, infrastruktur, Kesehatan dan lainnya dengan satu aplikasi saja (Anggrayni, 2022). Nagasina juga bisa menggunakan website, karena website memudahkan dalam berbagai macam informasi yang lengkap yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang dan selalu diupdate setiap harinya (Laksono et al., 2021)

Intensitas komunikasi dan kemudahan dalam berkomunikasi membuat Nagasina mampu menangani bencana tepat waktu, terkoordinir dan terpadu di Nagari Ganggo Hilia karena mampu berkolaborasi, bersinergi dan berintegrasi dengan pihak terkait. Pengelolaan informasi siaga bencana berbasis IT yang saat ini dilaksanakan oleh Nagasina Ganggo Hilia masih berupa grup percakapan *Whatsapp*. Efektivitas komunikasi Nagasina terlihat dari dampak yang dirasakan anggota kelompok, pemahaman terhadap penyuluhan dan perubahan yang dirasakan anggota setelah mendapatkan penyuluhan sehingga mampu menangani bencana tepat waktu, terkoordinir dan terpadu di Nagari Ganggo Hilia.

2. Faktor Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kebijakan, tolak ukur faktor sumber daya bisa dilihat dari sumber daya manusia, sumber daya sarana dan sumber daya anggaran. Pada sumber daya manusia bisa dilihat kuantitas sumber daya kualitas dan kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. BPBD Kabupaten

Pasaman memiliki keterbatasan pegawai sehingga berupaya untuk melibatkan masyarakat dengan membentuk kelompok masyarakat yang siaga bencana. BPBD juga berupaya untuk selalu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menanggulangi bencana. BPBD memberikan penyuluhan kepada kelompok Nagasiana dan masyarakat di Kecamatan Bonjol untuk diberikan edukasi terkait bencana alam dan upaya meminimalisir dampak bencana alam. Alim Bazar menyampaikan bahwa BPBD juga memberikan edukasi kepada siswa sekolah untuk dapat melihat tanda-tanda bencana alam dan mampu menyelamatkan diri apabila terjadi bencana. Pada tahun 2023, BPBD memberikan pelatihan pencegahan dan irigasi bencana kabupaten dan pelatihan keluarga tanggap bencana untuk 100 keluarga. BPBD akan dilaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan dan irigasi bencana pada tahun 2024. Penulis mewawancarai Nisa pada tanggal 23 September 2023 yang merasa senang mengikuti penyuluhan tentang bencana alam di sekolahnya. Sebuah program ini dapat terlaksana lebih optimal dengan pemberian peningkatan kapasitas siswa secara rutin dan mengadakan simulasi pelaksanaan bencana (Wicaksono & Sibuea, 2022).

BPBD juga memberikan pelatihan kepada kelompok Nagasina sebagai bentuk praktik atas edukasi yang sudah diberikan. berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok Nagasina di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman tanggal 21 September 2023 diketahui bahwa Nagasina Kecamatan Ganggo Hilia memiliki 30 Orang Anggota yang sudah beberapa kali mendapat pelatihan dari BPBD untuk meningkatkan kesigapan dan ketepatan serta keefektifan pada tahapan penanganan darurat. Dampak dari pelatihan tersebut dirasakan oleh Putra sebagai anggota Kelompok Nagasina di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol

yang diwawancarai pada tanggal 2 Oktober 2023. Beliau menyampaikan bahwa pelatihan tersebut menambah kesiapan yang membuat mereka bisa memberikan respon cepat ketika melihat tanda-tanda bencana alam dan segera berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Pasaman untuk dapat ditindaklanjuti.

Kelompok Nagasina memiliki kendala sumber daya sarana prasarana karena terdapat keterbatasan fasilitas yang dimiliki BPBD. Menurut Alim Bazar, idealnya setiap Kecamatan minimal tersedia pelampung, perahu karet, tenda, mobil komunikasi data dan mobil pengadaan air bersih yang bisa digunakan oleh kelompok masyarakat untuk latihan sehingga sudah mahir menggunakannya ketika terjadi bencana. Keterbatasan penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok nagasina dan fasilitas yang dimiliki disebabkan oleh terbatasnya APBD Kabupaten Pasaman yang dapat dialokasikan untuk penanggulangan bencana. BPBD berupaya untuk melaksanakan pelatihan dan melengkapi sarana dan prasarana secara bertahap sesuai tingkat urgensinya.

Kelompok Nagasina sudah memiliki 30 anggota tetapi penyelenggaraan Nagasina yang mampu menangani bencana tepat waktu, terkoordinir dan terpadu di Nagari Ganggo Hilia serta mengelola informasi siaga bencana berbasis IT belum terlaksana dengan optimal karena keterbatasan sumber daya anggaran untuk mampu menyelenggarakan lebih banyak pelatihan serta simulasi latihan dengan alat peraga (sarana).

3. Faktor Disposisi

Nagasina Ganggo Hilia memiliki target disposisi yang jelas yaitu Keputusan Wali Nagari Ganggo Hilia Nomor: 23/Kpts/WN-GH/2022 tentang Pembentukan Nagari Siaga Bencana Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Tujuan dibentuknya

Nagasina adalah agar masyarakat Nagari yang komunitas Nagasina dapat menangani bencana tepat waktu, terkoordinir dan terpadu di Nagari Ganggo Hilia serta mengelola informasi siaga bencana berbasis IT yang secara bertahap akan dipenuhi dan dilaksanakan.

Nagasina Ganggo Hilia konsisten untuk melaksanakan kegiatan untuk dapat menangani bencana tepat waktu, terkoordinir dan terpadu di Nagari Ganggo Hilia. Kelompok Nagasina komitmen dalam melaksanakan Wali nagari Ganggo Hilia. Wali Nagari menyampaikan bahwa beliau melihat kelompok nagari siaga bencana memiliki komitmen tinggi, antusias dan serius dalam melaksanakan kegiatan pelatihan. Anggota juga sering melakukan penyuluhan secara santai kepada masyarakat sambil duduk di warung. Keseriusan tersebut perlu dibarengi dengan kompetensi dan keahlian anggota kelompok yang dapat ditingkatkan dengan pelatihan dan praktik dengan menggunakan fasilitas yang sebenarnya. Upaya yang dilaksanakan oleh Camat Bonjol adalah dengan melakukan kegiatan rutin jumat bersih dengan membersihkan sampah-sampah dan saluran air agar tidak tersumbat. Kegiatan tersebut sejalan dengan kegiatan kelompok siaga bencana yang sering membersihkan gorong-gorong dan sungai untuk mencegah banjir.

Disposisi yang ada pada Nagasina Ganggo Hilia sudah baik karena dilaksanakan dengan komitmen sesuai kesepakatan dan kebijakan serta memiliki target yang terukur yaitu untuk menangani bencana tepat waktu, terkoordinir dan terpadu di Nagari Ganggo Hilia serta mengelola informasi siaga bencana berbasis IT.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Organisasi dengan struktur yang panjang membuat proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan menjadi lamban. BPBD Kabupaten Pasaman sudah

memperingkat proses birokrasi agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan cepat. Standar operasional prosedur juga memiliki tahapan yang jelas dan terukur sehingga dapat dipahami dilaksanakan sesuai sasaran yang direncanakan.

BPBD perlu melakukan penguatan kelembagaan agar kelompok masyarakat dapat berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana dan membentuk masyarakat yang lebih siaga dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Melalui penguatan kelembagaan Nagasita membuat kelompok Nagasita Nagari Ganggo Hilia memiliki tugas dan tanggung jawab yang melekat kepada anggota kelompok.

Struktur Organisasi Nagasina Ganggo Hilia sudah baik karena memiliki SOP yang terukur dan dijalankan sesuai komitmen bersama. Nagasina Ganggo Hilia juga memiliki struktur organisasi yang singkat dalam alur pembuatan perizinan dan kegiatan sehingga mampu terlaksana dengan tepat waktu, terkoordinir dan terpadu.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi Nagasina di Nagari Ganggo Hilia adalah:

1. BPBD memiliki kendala belum optimalnya koordinasi antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana.
2. Nagasina Nagari Ganggo Hilia belum melaksanakan pengelolaan data berbasis IT.
3. Anggota Nagasina Nagari Ganggo Hilia memerlukan lebih banyak pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian anggota.
4. Nagasina Nagari Ganggo Hilia belum memiliki sarana penanggulangan bencana.
5. Nagasina Nagari Ganggo Hilia memerlukan tambahan sumber daya anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Upaya yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi adalah:

1. BPBD merencanakan untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga dalam penanggulangan bencana pada tahun 2024.
2. Nagasina dapat mengembangkan website atau aplikasi penanggulangan bencana yang sudah pernah digunakan oleh Pemerintah Daerah lain dalam pengelolaan data berbasis IT.
3. BPBD mengagendakan untuk memberikan penyuluhan kepada Anggota Kelompok Nagasina di Kabupaten Pasaman.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 5 ayat (2), Nagasina dapat melengkapi fasilitas sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Apabila berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tersebut, maka anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya bisa dibebankan kepada dana Desa sesuai kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa implementasi penanggulangan bencana oleh Kelompok Nagari Siaga Bencana (Nagasina) di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman belum berjalan dengan optimal bila dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, yaitu:

1. Komunikasi yang dibangun Nagasina dengan pihak terkait sudah baik tetapi belum optimal dalam berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Nagasina belum mampu memanfaatkan IT dalam pengelolaan informasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
2. Nagasina Ganggo Hilia sudah memiliki kuantitas sumber daya manusia tetapi masih membutuhkan optimalisasi pada kualitas sumber daya manusia, sumberdaya sarana dan sumber daya anggaran.
3. Disposisi Nagasina Ganggo Hilia sudah terlaksana dengan baik karena disposisi dilaksanakan sesuai komitmen dan memiliki target yang terukur.
4. Struktur organisasi Nagasina sudah ideal karena memiliki SOP yang terukur dan dilaksanakan dengan komitmen serta memiliki alur perizinan kegiatan yang singkat.

Saran

Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

1. Nagasina harus aktif membentuk kerja sama dengan Kementerian, Lembaga, Universitas yang berkaitan tentang penanggulangan bencana alam untuk pengembangan kapasitas Nagasina. Nagasina harus mampu memanfaatkan IT dalam pengelolaan informasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
2. Anggota Nagasina membutuhkan lebih banyak pelatihan tentang penanggulangan bencana dan kunjungan ke Universitas untuk menambah pemahaman sesuai kebutuhan organisasi. Nagasina juga dapat menggunakan anggaran desa sesuai kebutuhan karena sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri. BPBD dan Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang

juga dapat membuat kerja sama menempatkan mahasiswa pada Universitas yang berkaitan dengan IT dan penanggulangan bencana untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nagari Ganggo Hilia agar anggota memiliki pemahaman tentang penanggulangan bencana dan membuat alat sederhana yang bermanfaat dalam penanggulangan bencana.

3. Nagasina dapat membuat disposisi dengan keterbaruan apabila disposisi lama sudah memenuhi target.
4. Nagasina perlu merencanakan struktur organisasi kedepannya apabila memiliki semakin banyak anggota serta mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrayni, I. (2022). Manajemen Pemerintahan Dalam Inovasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Kabupaten Karawang (Studi Pada Aplikasi Tanggap Karawang Atau Tangkar). *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 10–17. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i1.2458>
- Baidhowah, A. R., & Nangameka, T. (2020). Manajemen Kepegawaian Di Kementerian Dalam Negeri: Isu-Isu Yang Dihadapi. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 133–157. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1338>
- fahmi, Reza. (2022). Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. *Lingkungan Almuslim*, 1, 23–29.

- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139–146.
<https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- Keputusan Wali Nagari Ganggo Hilia Nomor: 23/Kpts/WN-GH/2022 tentang Pembentukan Nagari Siaga Bencana Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman
- Laksono, P., Maulana, R. A., & Khairunnisa, R. (2021). Strategi Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Optimalisasi Teknologi Informasi Di Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 60–67.
- Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pasaman Tahun 2022
- Machruf, I. N., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 129–146.
<https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i1.25>
- Mubarokah, A., & Hendrakusumah, E. (2022). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Perkebunan terhadap Ekosistem Lingkungan. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1–16.
<https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i1.754>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana Di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 126–138.
<https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1113>
- Rusmawan, T., Hamid, S., & Santoso, J. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 211.
<https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.211-220>
- Saptadi, G., & Djamal, H. (2012). Kajian Model Desa Tangguh Bencana Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bersama BPBD D.I Yogyakarta. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 3(2), 55–67.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71.
<https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Tejakusuma, I. G. (2018). Faktor Geologi Dan Lingkungan Dalam Kejadian Longsor Di Kabupaten Majalengka Jawa Barat. *Jurnal Sains Dan Teknologi Mitigasi Bencana*, 12(2), 19.
<https://doi.org/10.29122/jstmb.v12i2.1750>
- Ulum, M. C. (2013). Governance Dan Capacity Building Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Indonesia. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 4(2), 69–76.
- Wardhono, H., Budiyo, B., & Hartati, F. K. (2020). Desa wisata siaga bencana di desa bungurasih sidoarjo. *Journal Community Development and Society*, 2(1), 34–41.
<https://doi.org/10.25139/cds.v2i1.2512>
- Wicaksono, F. A., & Sibuea, R. P. (2022). Efektivitas Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Di Sma Negeri 1 Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 63–73.
<https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i2.2769>